

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ancel, M. (1965). *Social defence: A modern approach to criminal problems*. London: Routledge.
- Arief, B. N. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arnett, J. J. (2007). *International encyclopedia of adolescence: A–J, index*. London: Taylor & Francis.
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. New York: Free Press.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Bungin, B. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif* (T. R. Rohidi, Trans.). Jakarta: UI Press.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Reksodiputro, M. (1994). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of criminology*. Philadelphia: Lippincott.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. New York: Good Books.

### **Jurnal Ilmiah:**

- Basri, A. S. H. (2015). Fenomena tawuran antar pelajar dan intervensinya. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, 12(1), 1–25.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial* (M. Khozim, Trans.). Bandung: Nusa Media.
- Handayani, S., & Arizal, H. (2023). Peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tawuran di Kota Padang. *Jurnal Jurisprudencia*, 14(1).
- Huda, H., Effendi, E., & Putri, A. T. (2021). Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar oleh Polisi Resor Kota Padang. *JOM FHukum*, 8(2).
- Ingtyas, F. T. (2018). Peranan orang tua dalam mencegah tawuran antar pelajar. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 15(2).
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. London: Home Office.
- Massriyati, M. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelajar yang melakukan tawuran membawa senjata tajam. *Jurnal Hukum Respublica*, 23(1), 1–10.
- Mulizaldi, M. (2024). Peran social bonding terhadap tawuran antar pelajar: Studi kasus pelajar SMK di Kota Depok. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 911–916.
- Rahmat, B., & Fitriati, F. (2019). Kajian kriminologi terhadap tawuran yang berpotensi tindak pidana oleh pelajar di Kota Padang. *UNES Law Review*, 2(1), 1–13.

Ripa'i, M. J. (2019). Upaya guru PPKN dalam mencegah tawuran pelajar di SMK Bina Karya 1 Kabupaten Karawang. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2).

Supartono, A. M. (2024). Analisis teori kontrol sosial dalam tawuran pelajar di Jakarta. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 964–970.

### **Skripsi / Tesis:**

Ridwan, Riki. 2023. *Peran Satpol PP dalam Mengatasi Tawuran Pelajar Perspektif Masalah*. Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol.

Sofyan, Yogi Budi. 2014. *Pendidikan Karakter dalam Upaya Penanggulangan Tawuran Antar Pelajar di SMK Swasta*. Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

### **UU/Peraturan :**

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, khususnya Pasal 170 dan 351.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Pemerintah Kota Padang. *Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Anak*.